



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUTARTO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN UMUM**
3. NHK : **847978**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.840.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 297 m2/178 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/36 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
3. Tanah Seluas 4.489 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
4. Tanah Seluas 812 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
5. Tanah Seluas 1.060 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 1.625 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, Rp. 165.000.000
7. Tanah Seluas 1.740 m2 di KAB / KOTA KLATEN, Rp. 750.000.000
8. Tanah Seluas 2.175 m2 di KAB / KOTA KLATEN, Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 252.000.000**

1. MOBIL, KIA SEDAN RIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000



3. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 0213, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
4. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 191.140.600

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 902.466.740

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.185.607.340

III. HUTANG Rp. 83.333.328

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.102.274.012

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.